

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun kemajuan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, pendidikan, dan ekonomi, berbagai permasalahan sosial seperti konflik budaya, ketidakadilan, dan dampak sejarah masih terus dirasakan oleh masyarakat. Dalam kajian teori kekuasaan Michel Foucault ketimpangan kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai perbedaan dalam aspek ekonomi, tetapi juga mencakup ketimpangan dalam distribusi kekuasaan di dalam masyarakat. Ketimpangan kekuasaan terjadi ketika terdapat dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lain sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan (Kusuma & Sudikan, 2023). Kekuasaan dalam hal ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga dapat bekerja secara halus melalui mekanisme sosial yang memengaruhi perilaku, cara berpikir, dan posisi individu dalam masyarakat.

Karya sastra sebagai salah satu bentuk ekspresi budaya sering kali menjadi media untuk merepresentasikan sekaligus mengkritisi realitas sosial tersebut. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang kompleks. Dalam perspektif teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault, karya sastra dapat mengungkap mekanisme pengawasan, normalisasi, dan pengendalian yang bekerja secara halus dalam kehidupan masyarakat, termasuk ketimpangan kekuasaan yang tercermin melalui

konflik, karakter tokoh, serta relasi sosial yang dibangun dalam cerita (Haryanto & Widodo, 2022). Melalui representasi tersebut, karya sastra memiliki peran penting dalam membantu pembaca memahami dinamika kekuasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu karya sastra yang relevan untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Novel ini tidak hanya mengisahkan perjalanan hidup individu dalam menghadapi konflik sosial, tetapi juga merefleksikan kondisi masyarakat Aceh pada masa pascakonflik yang sarat dengan berbagai persoalan sosial. Secara lebih spesifik, novel ini memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan melalui relasi yang tidak seimbang antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ketimpangan tersebut tampak dalam hubungan antara aparat dan masyarakat sipil yang menunjukkan adanya dominasi, kontrol, serta pembatasan terhadap kehidupan individu.

Selain itu, ketimpangan kekuasaan dalam novel juga tercermin melalui praktik penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu yang memiliki posisi dominan. Salah satu tokoh dalam novel digambarkan memanfaatkan posisinya untuk menarik iuran dari masyarakat dengan dalih kepentingan perjuangan. Tindakan tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan secara semena-mena sehingga menimbulkan tekanan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu digunakan untuk melindungi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mengeksploitasi kelompok yang berada pada posisi lebih lemah. Di sisi lain, situasi pascakonflik yang digambarkan dalam novel memperlihatkan adanya marginalisasi terhadap kelompok tertentu, terutama masyarakat yang terdampak konflik secara langsung. Hal tersebut menunjukkan

bahwa ketimpangan kekuasaan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan kultural individu.

Melalui teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault, novel *Lampuki* dapat dianalisis sebagai representasi mekanisme pengawasan dan pengendalian yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Aceh pascakonflik. Foucault (1977) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu titik, melainkan tersebar dalam jaringan relasi sosial dan bekerja melalui praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang membentuk kepatuhan individu tanpa harus selalu menggunakan kekerasan fisik secara langsung. Teori ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika kekuasaan yang terdapat dalam cerita, sekaligus membuka pemahaman bahwa karya sastra bukan hanya produk imajinasi, tetapi juga dokumen yang merekam cara kerja kekuasaan dalam kehidupan nyata.

Kajian terhadap novel ini menjadi penting karena mampu menghadirkan gambaran yang kompleks mengenai relasi kekuasaan dalam masyarakat Aceh pascakonflik. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji ketimpangan kekuasaan dalam novel tersebut melalui teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault serta mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di tingkat SMA/SMK/MA masih relatif terbatas. Hal ini membuka peluang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sastra dan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, analisis ketimpangan kekuasaan dalam karya sastra memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam pembelajaran sastra di kelas XII SMA/SMK/MA. Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter dan kemampuan berpikir kritis memberikan ruang bagi pemanfaatan teori

kekuasaan Panoptikon Michel Foucault dalam pembelajaran sastra. Melalui perspektif teori ini, peserta didik tidak hanya memahami unsur intrinsik karya sastra, tetapi juga mampu membaca secara kritis mekanisme kekuasaan dan ketidakadilan yang tersembunyi dalam teks dan mengaitkannya dengan realitas sosial di sekitarnya. Selain itu, pembelajaran berbasis analisis kekuasaan ini dapat meningkatkan empati, kesadaran sosial, serta kemampuan literasi kritis peserta didik dalam memahami berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Karya sastra yang lahir dari tengah-tengah situasi sosial tertentu tidak pernah sepenuhnya fiktif. Ia mengandung jejak pengalaman, ingatan kolektif, dan sikap pengarang terhadap realitas yang dihadapinya. Dalam tradisi kesusastraan Indonesia, banyak karya yang merespons pergolakan sejarah bangsa, dari kolonialisme, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Novel *Lampuki* karya Arafat Nur adalah salah satu di antaranya. Novel yang pertama kali terbit pada tahun 2011 ini merupakan pemenang unggulan Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2010, sekaligus menjadi salah satu karya paling penting dalam jagat sastra Indonesia kontemporer yang mengangkat tema konflik bersenjata dan ketimpangan kekuasaan di Aceh.

Novel *Lampuki* memiliki relevansi yang kuat dan berlapis, baik dari sisi sastra maupun sosial-akademik. Secara sastra, novel ini menawarkan pendekatan narasi yang tidak lazim: alih-alih menghadirkan pahlawan perang atau ideolog pemberontakan, Arafat Nur memilih sudut pandang seorang Teungku biasa, seorang guru ngaji yang bukan siapa-siapa, sebagai tokoh sentral. Pilihan perspektif ini sangat tepat karena ia merepresentasikan suara yang paling sering diabaikan dalam setiap narasi konflik: suara masyarakat sipil. Sapardi Djoko Damono, salah

satu juri Sayembara DKJ 2010, menilai bahwa Arafat Nur berhasil mengambil jarak emosional dari masalah sosial yang diangkat tanpa mengorbankan empati, sehingga pembaca diajak merasakan tragedi dari dalam, bukan sekadar mengamati dari luar (Goodreads, 2024).

Relevansi historis novel ini tidak dapat dipisahkan dari luka panjang konflik Aceh yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Ketegangan antara Aceh dan pemerintah pusat sebenarnya sudah dimulai sejak era kemerdekaan, ketika janji otonomi yang diberikan oleh Sukarno kepada masyarakat Aceh atas kontribusi besar mereka dalam mendanai perjuangan kemerdekaan termasuk pembelian pesawat terbang pertama Indonesia tidak pernah sepenuhnya ditepati. Rasa dikhianati inilah yang kemudian menjadi benih perlawanan, hingga akhirnya melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976. Konflik yang kemudian dikenal dengan masa Daerah Operasi Militer (DOM, 1989–1998) meninggalkan ribuan korban jiwa, trauma mendalam, dan kesenjangan sosial yang berbekas hingga pascaperjanjian damai MoU Helsinki tahun 2005.

Dalam konteks itulah, novel *Lampuki* hadir bukan sekadar sebagai karya hiburan, melainkan sebagai monumen ingatan kolektif. Arafat Nur disebut sebagai korban sekaligus saksi hidup konflik Aceh yang pernah diculik, hampir dibunuh, dan kehilangan rumahnya akibat pembakaran semasa konflik. Pengalaman hidup yang kelam inilah yang kemudian dituangkannya ke dalam narasi fiksi yang terasa begitu otentik dan menyentuh. Dengan memilih sastra sebagai media perjuangan, Arafat Nur seolah menegaskan bahwa ada cara lain untuk menyuarakan kebenaran yang tidak tersampaikan melalui jalur politik atau media arus utama.

Pertanyaan yang kemudian menjadi sangat relevan adalah: setelah dua dekade perdamaian, apakah kondisi Aceh sudah benar-benar berubah? Apakah perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh sudah setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia? Jawabannya tidak sesederhana yang diharapkan. Di satu sisi, perjanjian damai MoU Helsinki 2005 melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus kepada provinsi ini, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Kebijakan ini secara formal mengakui keistimewaan Aceh dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri.

Namun di sisi lain, ketimpangan pembangunan di Aceh masih menjadi persoalan yang nyata dan belum sepenuhnya terpecahkan. Berdasarkan data BPS Aceh tahun 2025, angka kemiskinan di Aceh masih berada pada angka dua digit, yakni sekitar 12 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Ketimpangan antarwilayah dalam Aceh sendiri juga masih tajam: kawasan Barat Selatan Aceh, misalnya, secara konsisten menunjukkan kesenjangan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) yang tidak proporsional dibandingkan wilayah lain (Atjehterkini.id, 2026). Kondisi ini mendorong kalangan aktivis seperti WANGSA untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap mekanisme distribusi anggaran, dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi wilayah yang diperlakukan sebagai anak tiri dalam pembangunan.

Tantangan lain yang dihadapi Aceh adalah berkurangnya Dana Otonomi Khusus secara signifikan mulai tahun 2027. Menurut analisis ekonom dari Universitas Syiah Kuala, Prof. Taufiq C. Dawood, isu utama Aceh adalah

keterbatasan fiskal yang perlu segera dicari solusinya, terutama di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi dan minimnya peran investasi swasta dalam membentuk PDRB daerah (Kabarbireuen.com, 2025). Selain itu, ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa, termasuk Aceh, juga masih sangat mencolok. Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel kereta api di Indonesia, sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa, sementara Aceh hingga saat ini belum memiliki jaringan kereta api yang aktif (Kompas, 2026). Fakta ini memperlihatkan bahwa kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah masih menjadi warisan struktural yang belum sepenuhnya diatasi.

Kondisi diperparah oleh bencana banjir dan longsor besar yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025, yang merusak sedikitnya 56.652 hektare sawah dan 100.376 hektare lahan perkebunan rakyat. Bencana ini tidak hanya menghancurkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan betapa rentannya wilayah Aceh terhadap risiko bencana alam di tengah keterbatasan infrastruktur dan anggaran pemulihan (Kompas, 2026). Sementara itu, sebagian besar wilayah kepulauan dan pedalaman Aceh masih masuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dengan keterbatasan akses internet, layanan kesehatan, dan pendidikan yang layak. Dengan kata lain, kondisi Aceh masa kini memang tidak lagi berada dalam situasi konflik bersenjata, tetapi ketimpangan struktural antara Aceh dan pemerintah pusat belum sepenuhnya teratasi.

Untuk memahami novel *Lampuki* secara lebih mendalam, penting untuk memahami latar belakang sosial pengarangnya. Arafat Nur lahir pada 22 Desember 1974 di Lubuk Pakam, Sumatera Utara, namun tumbuh besar di Aceh, tepatnya

menempuh pendidikan dasar di Peureulak dan SLTP di Idi Rayeuk. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di tengah gejolak konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh. Ia bukan sekadar pengamat konflik ia adalah bagian dari masyarakat yang paling merasakan dampak langsung dari kekerasan yang terjadi. Pada tahun 1999, Arafat diculik oleh sebuah kelompok yang mencurigainya sebagai mata-mata karena aktivitasnya menulis puisi dan cerpen. Ia nyaris kehilangan nyawa, dan hanya selamat berkat campur tangan sebuah organisasi kemanusiaan (Kumpulan Biografi Cerpenis Indonesia, 2017).

Tidak lama setelah penculikan itu, rumah keluarganya dibakar habis beserta seluruh isinya, meninggalkan Arafat bersama ayah, ibu, dan keempat adiknya tanpa tempat tinggal. Pengalaman traumatik ini meninggalkan bekas yang sangat dalam pada jiwa dan cara pandangnya terhadap dunia. Alih-alih berhenti menulis, Arafat justru semakin tekun menggeluti sastra sebagai cara untuk mengolah kesedihan, amarah, dan harapan yang bercampur aduk. Karya-karyanya pun semakin kuat dipenuhi dengan aroma realitas sosial Aceh yang ia saksikan dan rasakan sendiri. Ia kemudian bekerja sebagai guru honorer dan jurnalis yang meliput langsung dinamika konflik di Aceh, pengalaman yang makin memperkaya bahan baku narasinya (Wikipedia, 2024).

Novel *Lampuki* sendiri ditulis oleh Arafat Nur dalam kondisi yang sangat berat: se usai perang, tidak lama setelah perjanjian damai ditandatangani, dalam keadaan hidup yang tidak menentu, miskin, dan kekurangan makan. Selama tiga tahun ia bersikeras menyelesaikan novel itu sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral terhadap memori kolektif yang ia bawa dalam dirinya. Tutar Arafat sendiri, potret Aceh dalam novelnya digambarkan 60 persen secara riil

berdasarkan pengalaman dan pengamatannya langsung, sedangkan sisanya melalui proses imajinasi yang tetap berpijak pada kenyataan (STKIP PGRI Ponorogo, 2020). Fakta ini menegaskan bahwa novel *Lampuki* bukan semata-mata produk imajinasi, melainkan representasi sosial yang sangat tinggi tingkat autentisitasnya.

Dalam perspektif teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault, pengalaman sosial seorang pengarang sangat menentukan cara ia merepresentasikan mekanisme kekuasaan dalam karyanya. Foucault (dalam Elden, 2023) menegaskan bahwa individu yang hidup di bawah tekanan kekuasaan tidak hanya menjadi objek yang dikontrol, tetapi juga menjadi subjek yang secara tidak sadar mereproduksi dan menyuarakan pengalaman pengendalian itu melalui berbagai medium ekspresi. Dalam konteks ini, Arafat Nur dapat dipahami sebagai subjek yang pernah secara langsung merasakan bekerjanya mekanisme kekuasaan dalam kondisi konflik diculik, diawasi, dihukum tanpa proses hukum yang adil sehingga pengalaman tersebut tertransformasi menjadi representasi yang sangat hidup dan otentik dalam novel *Lampuki*. Melalui karya-karyanya, ia menjadi jembatan ingatan antara generasi yang mengalami langsung kekerasan konflik dan generasi masa kini yang mungkin hanya mengenal Aceh melalui catatan sejarah atau berita media. Inilah yang menjadikan novel ini tidak hanya penting sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai dokumen kekuasaan dan sejarah yang tak ternilai.

Relevansi novel *Lampuki* dalam konteks pendidikan sastra juga sangat signifikan. Novel ini tidak hanya melatih kemampuan membaca dan menganalisis karya sastra, tetapi juga membangun empati, kesadaran sejarah, dan kepekaan sosial peserta didik terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila menekankan pentingnya

pembentukan karakter peserta didik yang bernalar kritis, berempati, dan berwawasan global. Melalui analisis terhadap novel *Lampuki* menggunakan teori Panoptikon Foucault, peserta didik di kelas XII SMA/SMK/MA dapat diajak untuk tidak hanya memahami unsur-unsur intrinsik karya sastra, tetapi juga mampu membaca secara kritis bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja dalam teks dan mengaitkannya dengan konteks sosial, sejarah, dan politik yang melingkupinya. Dengan demikian, pembelajaran sastra menjadi bermakna dalam arti yang sesungguhnya: mendidik peserta didik untuk menjadi manusia yang berpikir kritis dan peka terhadap realitas sosial.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas bahwa novel *Lampuki* karya Arafat Nur adalah karya yang lahir dari rahim pengalaman sosial yang sangat spesifik: konflik bersenjata di Aceh, ketimpangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah, serta marginalisasi kelompok sipil yang tidak berdaya di hadapan dua kekuatan besar yang saling berbenturan. Novel ini relevan dikaji bukan hanya karena nilai sastra yang tinggi, tetapi juga karena potensinya sebagai cermin sosial yang masih sangat aktual. Ketimpangan yang digambarkan dalam novel tersebut antara kelompok berkuasa dan masyarakat yang dikendalikan, antara pusat dan daerah, antara pemilik otoritas dan rakyat biasa bukan sekadar fenomena masa lalu, melainkan masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuknya di Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji ketimpangan kekuasaan dalam novel *Lampuki* melalui teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang kajian sastra, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis terhadap mekanisme pengawasan dan

dominasi kekuasaan yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer. Hal inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel *Lampuki* memiliki potensi yang besar untuk dikaji sebagai representasi ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks Aceh pascakonflik. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Ketimpangan Kekuasaan dalam Novel *Lampuki* Karya Arafat Nur: Kajian Teori Panoptikon Michel Foucault dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Sastra di Sekolah SMA/SMK/MA."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketimpangan kekuasaan dalam novel *Lampuki* karya Arafat Nur?
2. Bagaimana relevansi novel *Lampuki* karya Arafat Nur terhadap pembelajaran sastra di Kelas XII SMA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan ketimpangan kekuasaan dalam novel *Lampuki* karya Arafat Nur
2. Menganalisis relevansi ketimpangan kekuasaan dalam novel *Lampuki* terhadap pembelajaran sastra di kelas XII SMA

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam kajian sastra berbasis teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault, khususnya terkait dengan representasi mekanisme pengawasan, normalisasi, dan ketimpangan kekuasaan dalam karya sastra Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian akademik selanjutnya yang berfokus pada analisis relasi kuasa dalam sastra dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang hubungan antara sastra dan mekanisme kekuasaan yang bekerja dalam realitas sosial, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam kajian sastra Indonesia, terutama pada karya yang menggambarkan dinamika kekuasaan dan politik, seperti novel *Lampuki*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan materi pembelajaran sastra yang berbasis pada analisis kekuasaan dan konteks sosial. Dengan demikian, siswa mampu memahami karya sastra secara lebih mendalam dan aplikatif, tidak sekadar pada tataran unsur intrinsik, tetapi juga pada lapisan makna sosial-politik yang tersembunyi di balik teks. Penelitian ini juga mendukung penerapan kurikulum yang mengintegrasikan apresiasi sastra dengan penguatan karakter siswa melalui pemahaman terhadap isu-isu kekuasaan dan ketidakadilan sosial.

b. Bagi Pendidik

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi guru dalam mengimplementasikan teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault

sebagai pendekatan analisis dalam pembelajaran sastra. Dengan menggunakan teori ini, guru diharapkan dapat menciptakan metode pengajaran yang lebih inovatif dan kritis, sehingga siswa mampu memahami keterkaitan antara karya sastra dan mekanisme kekuasaan yang melatarbelakangi kondisi sosial yang digambarkan dalam cerita.

c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa dalam mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis, khususnya dalam menelaah karya sastra melalui perspektif teori kekuasaan Panoptikon Foucault. Dengan memahami bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan bekerja dalam karya sastra, siswa dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan yang ada di sekitar mereka, menjadikan pembelajaran sastra lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan landasan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji karya sastra melalui teori kekuasaan Panoptikon Michel Foucault. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuka peluang untuk mengembangkan kajian terkait relevansi karya sastra dalam mendukung pembelajaran yang berorientasi pada literasi kritis terhadap kekuasaan dan penguatan karakter peserta didik.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini (1) diteliti oleh Stevi Syalawati, Siti Maemunah (2025) jurnal dengan judul *Ketimpangan Sosial dalam Novel Aib dan Nasib Karya Minanto (Kajian Sosiologi Sastra)*. Secara keseluruhan, penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan teori Max Weber. Penelitian tersebut menemukan adanya ketimpangan kelas, status dan kekuasaan dalam masyarakat Desa Tegalurung yang digambarkan dalam novel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji ketimpangan sosial dalam karya sastra novel dengan pendekatan sosiologi sastra. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada objek yang dikaji. Objek penelitian Stevi dan Maemunah (2025) adalah novel *Aib dan Nasib*, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada novel *Lampuki*. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada bentuk ketimpangan sosial, sedangkan pada penelitian ini juga mengaitkan dengan relevansi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang kontribusi yang lebih luas, terutama dalam konteks pendidikan.

Penelitian serupa yang kedua diteliti oleh Karuniawati dan Andalas (2022) dalam jurnal yang berjudul *Ketimpangan sosial dalam novel burung berpagut emas karya M, Sjohirin*, yang membahas ketimpangan sosial dalam novel *Burung Berpagut Emas*. Melalui pendekatan sosiologi sastra, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara masyarakat desa dan kota digambarkan lewat kondisi ekonomi, cara pandang sosial, serta masalah kekuasaan. Novel tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat desa sering berada dalam posisi

yang kurang diuntungkan dibandingkan masyarakat kota. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama mengangkat tema ketimpangan sosial dalam karya sastra. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji; penelitian sebelumnya menggunakan novel *Burung Berpagut Emas*, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan novel *Lampuki*. Pada penelitian saya juga mengaitkan relevansinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XII, sehingga ruang lingkupnya lebih luas daripada penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya diteliti oleh peneliti dalam jurnal yang berjudul *Relasi Kuasa dalam Novel The Rise of Majapahit Perspektif Michel Foucault* (2022). Penelitian ini membahas relasi kuasa yang terjadi dalam karya sastra dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan perspektif Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam novel tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bekerja melalui relasi sosial yang memengaruhi perilaku dan posisi tokoh dalam masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas aspek kekuasaan dalam karya sastra serta menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian yang digunakan, di mana penelitian tersebut mengkaji novel *The Rise of Majapahit*, sedangkan penelitian ini berfokus pada novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan hasil analisis dengan relevansi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XII SMA/SMK/MA sehingga memiliki cakupan yang lebih luas.

Penelitian serupa selanjutnya diteliti oleh Risa Kartika Rifqi (2021) Skripsi dengan judul *Kritik Sosial dalam Novel Si Parasit Lajang karya Ayu Utami dan*

relevansinya terhadap Pembelajaran Pesan pada buku fiksi Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel *Si Parasit Lajang* mengandung pesan-pesan sosial yang kuat, menggambarkan konflik kelas, diskriminasi, dan relasi kekuasaan yang tidakimbang di dalam masyarakat. Sedangkan persamaan dari penelitian Rifqi dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan menyoroti kritik sosial yang tertanam dalam karya sastra sebagai refleksi realitas masyarakat. Dan mengaitkan temuan sastra dengan konteks sosial yang lebih luas. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek objek dan cakupan kajian: Rifqi fokus pada novel *Si Parasit Lajang* dan lebih mengarah pada kritik sosial dan pesan moral untuk pembelajaran fiksi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada ketimpangan sosial dalam novel *Lampuki*, khususnya ketimpangan pascakonflik dan bagaimana ketimpangan itu tercermin dalam struktur sosial dan hubungan tokoh. Sedangkan Kelebihan penelitian saya dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada kedalaman analisis sosial dan kontribusi praktisnya dalam pendidikan tidak hanya menganalisis struktur ketimpangan sosial dalam novel, tetapi juga menjelaskan bagaimana analisis tersebut bisa diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XII SMA/SMK/MA.

Penelitian terdahulu yang kelima, Muhammad Naufal Bissawab (2025) melakukan penelitian Skripsi yang berjudul *Fenomena Sosial dalam Novel “86” Karya Okky Madasari: Tinjauan Sosiologi Sastra*. Naufal meneliti fenomena-fenomena sosial yang digambarkan dalam novel tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi praktik suap dan penyalahgunaan narkoba sebagai dua fenomena sosial utama dan menyatakan bahwa novel tersebut mencerminkan realitas sosial masyarakat modern yang kompleks. Penelitian ini juga menggunakan metode

deskriptif kualitatif dan studi pustaka untuk menggali hubungan antara fiksi dan realitas sosial yang digambarkan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian sosial dalam sastra dan penggunaan metode kualitatif untuk menelusuri realitas sosial melalui teks sastra. Namun, perbedaannya dari kedua penelitian ini sangat jelas penelitian terdahulu lebih menekankan fenomena kriminal dan korupsi dalam masyarakat urban, sementara penelitian ini lebih menitik beratkan pada ketimpangan sosial pada masyarakat Aceh pasca terjadinya konflik, yang mencakup aspek ekonomi, identitas, dan struktur kekuasaan sosial. Kelebihan dari penelitian ini adalah cakupan tema yang lebih luas dan memiliki relevansi terhadap pendidikan: selain analisis sosial, saya juga berniat mengaitkan hasilnya dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat sekolah SMA/SMK/MA.

Penelitian terdahulu keenam yang relevan selanjutnya diteliti oleh Wahyuni Hasdar (2021) Skripsi yang berjudul *Kritik Sosial dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Tinjauan Sosiologi Sastra* mengkaji kritik sosial yang muncul dalam novel tersebut melalui kacamata sosiologi sastra. Hasdar menemukan bahwa novel tersebut mengandung kritik terhadap kekerasan aparat, ketimpangan pemberitaan media, dan sistem pendidikan yang tidak adil. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menggambarkan bagaimana struktur sosial dan relasi kekuasaan masyarakat tercermin dalam isi novel. Dari segi kesamaan, penelitian Hasdar dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan membahas kritik sosial/ketimpangan dalam karya sastra. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif dengan analisis teks sebagai inti penelitian. Namun, berbeda dalam objek kajian: Hasdar meneliti

novel *Orang-Orang Oetimu*, sedangkan penelitian ini berfokus pada novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Selain itu, penelitian juga menyoroti ketimpangan sosial pascakonflik Aceh dan kemudian menghubungkannya dengan relevansi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas XII SMA/SMK/MA. Dan penelitian saya memiliki kelebihan karena memberikan kontribusi dalam konteks pendidikan .

Anggi Iqra Uswatun Hasanah (2021) melakukan penelitian Skripsi yang berjudul *Kritik Sosial dalam Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika* membahas berbagai bentuk kritik sosial yang muncul dalam cerita, terutama yang berkaitan dengan isu diskriminasi, prasangka budaya, dan ketidakadilan yang dialami tokoh-tokohnya. Penelitian Anggi menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkap bagaimana pengarang menampilkan masalah sosial melalui alur dan konflik. Dari sisi tema dan pendekatan, penelitian Anggi memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti persoalan sosial dalam karya sastra. Namun, kedua penelitian ini memiliki perbedaan penelitian Anggi berfokus pada kritik sosial lintas budaya, sedangkan penelitian ini mengkaji ketimpangan sosial dalam novel *Lampuki* yang berlatar masyarakat Aceh pascakonflik. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan pembahasan mengenai relevansi hasil analisis terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII, sehingga ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan penelitian sebelumnya

F. Kajian Teoritis

Pada bab ini dijelaskan berbagai teori yang digunakan untuk menganalisis data yang ada. Teori-teori tersebut mencakup teori-teori yang berhubungan dengan analisis sosiologi sastra.

1. Ketimpangan Kekuasaan

Ketimpangan kekuasaan merupakan kondisi ketika distribusi kekuasaan dalam masyarakat tidak berlangsung secara merata sehingga memungkinkan terjadinya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengontrol perilaku, menentukan kebijakan, serta memengaruhi cara berpikir individu dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian ilmu sosial, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan yang terlihat secara langsung. Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tersebar dalam berbagai relasi sosial dan bekerja melalui mekanisme yang membentuk perilaku serta kesadaran individu (Dasion, Madrah, & Mukhijab, 2023, p. 73). Kekuasaan dapat hadir dalam bentuk aturan, kebiasaan, maupun praktik sosial yang membuat individu secara tidak langsung tunduk pada sistem yang berlaku. Dengan demikian, ketimpangan kekuasaan dapat terjadi ketika relasi tersebut menempatkan satu pihak dalam posisi dominan, sementara pihak lain berada dalam posisi yang dikendalikan (Jones , 2015, p. 20).

Konsep ini relevan untuk memahami dinamika yang terdapat dalam novel Lampuki, khususnya dalam menggambarkan hubungan antara pihak yang memiliki otoritas dengan masyarakat sipil. Dalam novel tersebut, kekuasaan tidak hanya tampak dalam bentuk kekerasan atau tekanan secara langsung, tetapi juga melalui praktik-praktik sosial yang membatasi kebebasan individu, seperti kontrol terhadap kehidupan masyarakat dan penentuan aturan yang harus diikuti.

Selain itu, Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan dapat berlangsung melalui hegemoni, yaitu dominasi yang dilakukan secara tidak

langsung melalui persetujuan masyarakat. Dalam kondisi ini, kelompok yang didominasi sering kali menerima aturan atau kebijakan yang merugikan mereka sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan tidak selalu disadari oleh pihak yang berada dalam posisi lemah.

Dalam novel biasanya, kondisi tersebut dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tetap mengikuti aturan atau tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam praktiknya aturan tersebut dapat merugikan mereka. Situasi ini menunjukkan adanya dominasi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berlangsung melalui penerimaan sosial yang terbentuk dalam masyarakat.

Sementara itu, pemikiran Karl Marx juga dapat digunakan untuk melengkapi analisis ketimpangan kekuasaan, terutama dalam melihat hubungan antara kekuasaan dan penguasaan sumber daya. Marx menekankan bahwa ketimpangan muncul dari struktur sosial yang menempatkan satu kelompok sebagai pihak yang menguasai sumber daya, sementara kelompok lain berada dalam posisi yang bergantung (Wasimo, Barokah, Maulida, & Ismuwardani, 2026, p. 3). Dalam konteks karya sastra, hal ini dapat tercermin melalui kondisi tokoh yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya akibat posisi sosialnya.

Dengan demikian, ketimpangan kekuasaan dapat diidentifikasi melalui berbagai bentuk, seperti dominasi struktural, kontrol sosial, penyalahgunaan wewenang, eksploitasi sumber daya, serta marginalisasi kelompok tertentu. Ketimpangan ini bersifat berlapis dan saling mengait, sehingga memerlukan analisis yang komprehensif untuk memahami cara kerja kekuasaan dalam membentuk relasi sosial. Oleh karena itu, kajian tentang ketimpangan kekuasaan menjadi landasan teoritis yang penting dalam menganalisis dinamika sosial yang

terdapat dalam teks sastra maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum (Kusuma & Sudikan, 2023).

2. Novel

Menurut Drs. Rostamaji, M.Pd. novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang tersusun dari berbagai unsur penting. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik (Dewi, 2023, p. 25). Kedua unsur tersebut memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun keseluruhan karya. Unsur intrinsik biasanya berkaitan dengan elemen yang ada di dalam teks itu sendiri, seperti alur, tokoh, latar, dan tema.

Sementara itu, unsur ekstrinsik berhubungan dengan faktor-faktor di luar teks, seperti kondisi sosial, budaya, atau pengalaman pengarang. Meskipun berbeda, unsur intrinsik dan ekstrinsik saling memengaruhi dan menentukan kualitas serta makna dari sebuah novel. Hubungan antara keduanya membuat karya sastra menjadi utuh dan mampu menyampaikan pesan secara mendalam kepada pembaca. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua unsur ini penting untuk menganalisis dan mengapresiasi sebuah novel secara komprehensif.

Novel berasal dari bahasa Italia *novella*, yang kemudian berkembang menjadi bentuk prosa panjang. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang paling dikenal di dunia. Jenis sastra ini banyak beredar karena memiliki kemampuan komunikasi yang sangat efektif di kalangan masyarakat. Novel merupakan karya sastra yang panjang dan umumnya disusun dalam beberapa bab dengan muatan cerita fiksi dengan memanfaatkan plot, tokoh/ karakter, setting, dan tema. Penyajian cerita yang demikian memungkinkan pengarang dapat menghadirkan peristiwa-peristiwa

secara lebih rinci , sehingga memudahkan pembaca dalam menangkap pesan yang disampaikan penulis , baik secara tersurat maupun tersirat.

Secara umum, pengertian novel adalah karangan prosa yang cukup panjang dan memuat rangkaian cerita tentang kehidupan seorang tokoh beserta interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam novel, penokohan menjadi hal penting karena sifat dan watak setiap karakter ditonjolkan untuk membentuk alur cerita. Cerita dalam novel biasanya diawali oleh peristiwa penting yang dialami tokoh utama, yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan cara ini, novel tidak hanya menyajikan kisah, tetapi juga menggambarkan perkembangan karakter secara mendetail.

Penulis novel dikenal sebagai novelis, yang bertugas menciptakan cerita serta menyusun alur dan karakter agar menarik bagi pembaca. Novel menjadi salah satu bahan bacaan yang populer karena memiliki cerita yang seru dan mampu menarik perhatian. Selain hiburan, novel juga menawarkan pemahaman tentang kehidupan dan interaksi sosial melalui pengalaman tokoh-tokohnya. Hal ini membuat novel tidak hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga bernilai sebagai media pembelajaran dan refleksi.

Dalam kajian sosiologi sastra, novel dipandang sebagai media yang mampu merepresentasikan realitas sosial, termasuk berbagai bentuk ketimpangan dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui cerita, pengarang kerap menghadirkan gambaran mengenai perbedaan akses, kesempatan, dan kualitas hidup antara kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana kritik sosial yang dapat menumbuhkan kesadaran pembaca mengenai pentingnya keadilan dan kesetaraan

dalam kehidupan bermasyarakat (Dewi, 2023). Dengan demikian, novel menjadi salah satu medium ekspresi yang paling efektif dalam merekam dan menyuarakan dinamika kekuasaan serta ketidakadilan yang berlangsung di tengah masyarakat.

3. Teori Kekuasaan Panoptikon

Teori Panoptikon merupakan salah satu konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault dalam menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan sosial. Konsep ini menjadi bagian penting dalam pemikiran Foucault mengenai hubungan antara kekuasaan, pengawasan, dan pembentukan perilaku individu. Berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap kekuasaan hanya dimiliki oleh pemerintah, penguasa, atau kelompok tertentu, Foucault memandang bahwa kekuasaan tersebar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan hadir dalam relasi sosial sehari-hari (Foucault, 1977).

Pemikiran Foucault mengenai Panoptikon berawal dari rancangan bangunan penjara yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18. Bentham merancang sebuah bangunan penjara berbentuk melingkar dengan sebuah menara pengawas yang berada di bagian tengah. Posisi menara tersebut memungkinkan petugas untuk mengawasi seluruh penghuni sel tanpa diketahui kapan pengawasan itu dilakukan. Para tahanan tidak dapat memastikan apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Kondisi tersebut membuat para tahanan bertindak seolah-olah mereka selalu berada dalam pengawasan sehingga secara tidak langsung mengontrol perilaku mereka sendiri (Foucault, 1977).

Menurut Foucault, Panoptikon tidak hanya dipahami sebagai bentuk bangunan penjara, tetapi juga sebagai metafora yang menggambarkan cara kerja

kekuasaan dalam masyarakat modern. Dalam sistem Panoptikon, kekuasaan tidak dijalankan melalui kekerasan fisik yang tampak secara langsung, melainkan melalui mekanisme pengawasan yang mampu membentuk kesadaran individu. Individu yang merasa dirinya selalu diawasi akan cenderung mematuhi aturan dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan menjadi instrumen penting dalam menjalankan kekuasaan secara efektif.

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui larangan, hukuman, atau tindakan represif. Kekuasaan juga dapat bekerja secara halus melalui berbagai mekanisme sosial yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak hanya berfungsi menekan individu, tetapi juga membentuk individu menjadi pribadi yang sesuai dengan kepentingan sistem sosial tertentu. Kekuasaan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh satu pihak, melainkan sebagai jaringan relasi yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Selain membahas Panoptikon, Foucault juga mengemukakan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Menurutnya, kekuasaan dan pengetahuan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan dapat digunakan untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan kekuasaan dapat menghasilkan pengetahuan baru yang mendukung keberlangsungan sistem yang ada. Foucault menyebut hubungan tersebut sebagai *power/knowledge*. Melalui pengetahuan yang dimiliki, suatu pihak dapat menentukan standar, aturan, dan

kriteria yang harus diikuti oleh individu lain. Akibatnya, individu akan cenderung menerima aturan tersebut sebagai sesuatu yang benar dan wajar.

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan terlihat dalam berbagai institusi sosial. Sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintahan, militer, dan berbagai organisasi sosial memiliki aturan yang mengatur perilaku individu. Aturan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam kondisi ini, individu secara perlahan menyesuaikan dirinya terhadap norma yang berlaku sehingga kekuasaan dapat bekerja tanpa harus menggunakan paksaan secara langsung.

Salah satu konsep penting dalam teori Panoptikon adalah pengawasan (*surveillance*). Pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap perilaku individu atau kelompok untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pandangan Foucault, pengawasan merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang paling efektif karena mampu menciptakan kepatuhan tanpa harus selalu menggunakan hukuman. Individu yang merasa dirinya berada dalam pengawasan akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung mengendalikan perilakunya sendiri.

Pengawasan dalam masyarakat modern tidak hanya dilakukan melalui kehadiran fisik seseorang yang mengawasi. Pengawasan juga dapat berlangsung melalui berbagai aturan, kebijakan, kebiasaan sosial, maupun sistem administrasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, individu tidak hanya diawasi oleh orang lain, tetapi juga oleh sistem yang membentuk perilaku mereka.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pengawasan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial modern.

Konsep berikutnya adalah disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan mekanisme yang digunakan untuk membentuk individu agar patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Menurut Foucault, masyarakat modern banyak menggunakan sistem disiplin sebagai cara untuk menghasilkan individu yang taat, produktif, dan mudah dikendalikan. Disiplin dilakukan melalui berbagai prosedur, aturan, jadwal, maupun bentuk pengendalian lainnya yang secara terus-menerus memengaruhi perilaku individu.

Melalui disiplin, individu dibiasakan untuk mengikuti standar tertentu yang ditetapkan oleh lingkungan sosialnya. Proses tersebut berlangsung secara berulang sehingga individu akhirnya menganggap kepatuhan sebagai sesuatu yang normal. Dengan demikian, disiplin menjadi salah satu sarana yang memungkinkan kekuasaan bekerja secara efektif tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung.

Selain pengawasan dan disiplin, Foucault juga menjelaskan konsep normalisasi (*normalization*). Normalisasi merupakan proses pembentukan standar mengenai perilaku yang dianggap benar, ideal, dan sesuai dengan norma masyarakat. Melalui normalisasi, individu didorong untuk menyesuaikan dirinya terhadap standar yang telah ditentukan. Individu yang mampu memenuhi standar tersebut akan dianggap normal, sedangkan individu yang berbeda akan dianggap menyimpang.

Normalisasi menjadi salah satu mekanisme penting dalam sistem Panoptikon karena memungkinkan kekuasaan bekerja melalui pembentukan kesadaran individu. Dalam kondisi ini, individu tidak lagi merasa dipaksa untuk mengikuti aturan, tetapi secara sukarela menyesuaikan dirinya dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, normalisasi sering kali lebih efektif dibandingkan penggunaan kekerasan atau hukuman secara langsung.

Menurut Kelly (2022), pemikiran Foucault mengenai pengawasan dan disiplin masih relevan digunakan untuk memahami berbagai bentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Kekuasaan tidak lagi hanya dijalankan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui berbagai mekanisme yang membentuk perilaku individu. Pengawasan yang berlangsung secara terus-menerus menyebabkan individu menjadi subjek yang patuh terhadap sistem yang mengaturnya.

Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep Panoptikon tidak hanya diterapkan dalam institusi formal seperti penjara atau sekolah. Konsep tersebut juga dapat digunakan untuk memahami berbagai bentuk kontrol sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi informasi, media sosial, sistem administrasi digital, serta berbagai bentuk pengawasan lainnya menunjukkan bahwa mekanisme Panoptikon masih terus berlangsung dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks (Elden, 2023).

Melalui teori Panoptikon, kekuasaan dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak hanya beroperasi melalui tindakan represif, tetapi juga melalui proses pembentukan perilaku dan kesadaran individu. Kekuasaan bekerja dengan

menciptakan kondisi yang membuat individu merasa diawasi sehingga mereka secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, teori Panoptikon memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana relasi kekuasaan berlangsung dalam kehidupan sosial.

4. Pembelajaran Sastra

Pembelajaran sastra merupakan salah satu peran penting dalam dunia pendidikan karena tidak hanya membantu siswa mengenal dan memahami berbagai bentuk karya sastra, tetapi juga melatih kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan kreatif. Melalui sastra, siswa belajar memahami nilai kehidupan yang disampaikan lewat cerita, tokoh, dan peristiwa. Proses ini dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun kepekaan mereka terhadap berbagai pengetahuan dan pengalaman seseorang.

Karya sastra sendiri sering dipandang sebagai cerminan realitas yang menawarkan banyak sudut pandang baru bagi pembacanya. Di dalamnya tersimpan beragam unsur seperti nilai sosial, budaya, moral, hingga keagamaan yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, siswa dapat mengembangkan empati dan kreativitas yang penting bagi perkembangan pribadi mereka.

Pembelajaran sastra memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra, salah satunya adalah novel. Sastra merupakan wujud ekspresi kreatif seseorang yang merefleksikan pandangan terhadap kehidupan sosial di sekitarnya dengan penggunaan bahasa yang indah. Karya sastra lahir dari hasil refleksi pengarang terhadap berbagai fenomena yang ia temui. Sebagai karya fiksi, sastra tidak hanya menyajikan cerita khayalan ataupun angan-

angan dari pengarang tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih mendalam. Sastra merupakan wujud kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah ide yang ada dalam pikirannya.

Pembelajaran sastra dalam dunia pendidikan turut memberikan kontribusi besar pada pengembangan kosakata serta keterampilan berbahasa siswa. Melalui berbagai bentuk ungkapan figuratif, pencitraan, dan ekspresi emosional dalam teks sastra, siswa dapat memperluas cara mereka memahami dan menggunakan bahasa. Proses ini membuat siswa tidak hanya membaca, tetapi juga menyerap ragam gaya dan nuansa bahasa yang lebih beragam.

Selain itu, pembelajaran sastra pada dasarnya tidak sebatas pada penguasaan materi materi yang ada di kelas. Melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan menafsirkan karya sastra, siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lebih mendalam. Dengan begitu, pembelajaran sastra membantu membentuk kemampuan berbahasa yang lebih luas serta mendorong siswa menjadi pengguna bahasa yang lebih reflektif.

Melalui pembelajaran sastra, peserta didik dapat mengenal berbagai aspek kehidupan, mulai dari keragaman budaya, lapisan masyarakat, hingga nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya. Sastra juga memperkenalkan keindahan bahasa serta cara pandang pengarang terhadap realitas yang digambarkan. Di dalam karya, biasanya terselip ideologi dan sudut pandang pengarang yang bisa dipelajari lebih jauh oleh peserta didik. Dari proses memahami ideologi itulah, peserta didik dapat memahami bahwa kebudayaan Indonesia sangat beragam dan tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, membaca karya sastra membuat peserta didik melihat lebih dekat latar budaya tempat karya itu lahir.

Semakin banyak karya yang mereka baca, semakin luas pula wawasan dan cara pandang yang bisa mereka bangun. Keragaman ideologi yang terserap dari berbagai bacaan akan membantu peserta didik memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya. Selain itu, keberagaman tersebut juga diharapkan dapat memperluas cara mereka dalam menilai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Pembelajaran sastra pada akhirnya bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberi ruang bagi peserta didik untuk mengenali dirinya sekaligus memahami tentang pengalaman hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Dengan demikian, sastra menjadi sarana refleksi sekaligus media belajar yang menumbuhkan kepekaan peserta didik terhadap realitas.

Bahasa dan sastra memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, sastra adalah cara kreatif bagi manusia untuk mengekspresikan pikiran, pengalaman, dan perasaannya lewat bahasa. Oleh sebab itu, sastra memiliki fungsi sebagai media pembelajaran bahasa yang paling bermakna. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sastra dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara meningkatkan keterampilan berbahasa seperti kosakata, tata bahasa, struktur kalimat, keterampilan berbicara, menulis, membentuk dan mengembangkan pikiran peserta didik menggunakan nilai, moral serta budaya (Sari Y. , 2024)

5. Pembelajaran Novel

Pembelajaran novel merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran sastra di sekolah. Novel sebagai karya sastra berbentuk prosa panjang memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai sarana pengembangan kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir kritis, serta pembentukan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran novel, peserta didik tidak hanya diajak

memahami unsur-unsur pembangun cerita, tetapi juga memahami berbagai nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembelajaran novel tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan peserta didik.

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, novel termasuk salah satu jenis teks sastra yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan apresiasi sastra peserta didik. Kegiatan pembelajaran novel umumnya meliputi membaca, memahami isi cerita, mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik, menafsirkan makna, serta menghubungkan isi cerita dengan realitas kehidupan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan interpretatif terhadap berbagai persoalan yang terdapat dalam karya sastra.

Pembelajaran novel juga berperan dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Novel menyajikan berbagai peristiwa, konflik, dan pengalaman tokoh yang dapat membantu peserta didik memahami berbagai fenomena kehidupan secara lebih luas. Kegiatan membaca novel memungkinkan peserta didik memperkaya kosakata, memahami penggunaan bahasa dalam konteks yang beragam, serta meningkatkan kemampuan memahami informasi secara mendalam. Oleh karena itu, novel sering dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang mendukung penguatan budaya literasi di lingkungan pendidikan.

Selain meningkatkan kemampuan literasi, pembelajaran novel juga dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Melalui proses membaca dan menganalisis cerita, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah, memahami hubungan sebab akibat, menafsirkan

tindakan tokoh, serta mengevaluasi berbagai peristiwa yang terdapat dalam cerita. Kegiatan tersebut mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu memberikan tanggapan dan penilaian berdasarkan pemahaman yang dimilikinya.

Pembelajaran novel juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Berbagai nilai yang terdapat dalam cerita, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian sosial, dan keberanian, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Melalui pengalaman tokoh-tokoh dalam cerita, peserta didik dapat belajar memahami konsekuensi dari suatu tindakan serta mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Kurikulum Merdeka maupun kurikulum sebelumnya, pembelajaran novel diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi karya sastra. Apresiasi sastra tidak hanya mencakup kemampuan memahami isi cerita, tetapi juga kemampuan menafsirkan makna, menemukan pesan yang terkandung dalam teks, serta menghubungkan isi karya sastra dengan pengalaman dan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran novel menjadi salah satu sarana yang dapat membantu peserta didik memahami berbagai persoalan kehidupan melalui sudut pandang yang berbeda.

Keberhasilan pembelajaran novel dipengaruhi oleh pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Novel yang digunakan dalam pembelajaran hendaknya memiliki bahasa yang mudah dipahami, memuat nilai-nilai pendidikan yang positif, serta relevan dengan perkembangan psikologis dan

sosial peserta didik. Selain itu, isi cerita juga perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemilihan bahan ajar yang tepat, pembelajaran novel dapat berlangsung secara lebih efektif dan bermakna.

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran novel dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan novel sebagai media untuk mengembangkan kemampuan literasi, apresiasi sastra, berpikir kritis, serta pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, novel tidak hanya berfungsi sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami berbagai nilai dan realitas kehidupan yang terdapat dalam masyarakat.

G .Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode *library research* (ke pustakaan) yang seluruh prosesnya dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, dengan novel sebagai objek kajian utama. Metode penelitian ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis teks dan berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian, bukan pada pengumpulan data lapangan. Metode ke pustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data yang terdapat dalam teks, khususnya yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, pengawasan, dan bentuk-bentuk ketimpangan kekuasaan yang dianalisis menggunakan teori Panoptikon Michel Foucault.

2. Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian ini adalah novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Novel ini dipilih karena memuat representasi ketimpangan sosial, relasi kuasa, dan dinamika masyarakat Aceh pascakonflik yang relevan untuk dianalisis melalui pendekatan sosiologi sastra.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer dalam penelitian ini berasal dari novel *Lampuki* karya Arafat Nur yang menjadi objek kajian utama. Data berupa kutipan-kutipan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel, jurnal, buku serta referensi lain yang berkaitan dengan kajian ketimpangan kekuasaan, sosiologi sastra, dan novel *Lampuki*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, teknik baca, dan teknik catat. Teknik analisis data terdiri dari empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data disajikan secara kualitatif. Berdasarkan Teknik analisis isi menurut Weber

dan Moleong, metode ini merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara sistematis dari isi suatu dokumen atau teks. Data penelitian disusun berdasarkan Teknik yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini:

1. Identifikasi data, mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori kekuasaan panoptikon dan Ketimpangan kekuasaan pada novel .
2. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang sesuai dengan teori mengenai ketimpangan kekuasaan dalam novel *Lampuki karya Arafat nur*
3. Analisis data, mengkaji data berdasarkan teori sosiologi sastra yang digunakan dalam penelitian.
4. Interpretasi data, pemberian pemaknaan terhadap hasil analisis mengenai ketimpangan kekuasaan yang ada pada novel lampuki karya Arafat nur
5. Simpulan, menyimpulkan hasil analisis penelitian tentang permasalahan sosial yang ada dalam novel lampuki karya Arafat nur.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi, dimulai dari mengidentifikasi kutipan atau bagian novel yang berkaitan dengan masalah penelitian, mengelompokkannya sesuai kategori ketimpangan kekuasaan yang tampak, kemudian menafsirkan temuan tersebut mengkaji data berdasarkan teori Panoptikon Michel Foucault yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana kekuasaan direpresentasikan dalam teks. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab fokus

penelitian sekaligus menghubungkannya dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII. Keabsahan data dijaga dengan cara membandingkan temuan analisis dengan berbagai referensi teori dan penelitian sebelumnya sehingga interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dan logis.